



## *The Impact of Consumer Rationality on Sectoral Economic Growth: Evidence from Indonesia*

### **Dampak Rasionalitas Konsumen pada Pertumbuhan Ekonomi Sektoral: Bukti dari Indonesia**

**Nur Imam Saifuloh<sup>1\*</sup>, Anas Iswanto Anwar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Hasanuddin Makassar,

E-Mail: <sup>1</sup> saifulohni20a@student.unhas.ac.id, <sup>2</sup> aianwar@fe.unhas.ac.id

*\*Corresponding Author: Nur Imam Saifuloh*

#### **Abstract**

*Economic growth in Indonesia is still largely supported by public consumption. When there was economic turmoil due to the COVID-19 pandemic, people's movements declined, as shown by Google Mobility Index data. This situation is reinforced by various policies that limit people's movement. This study will further discuss the rationality of the Indonesian people in responding to existing policies and their impact on the sectoral economy. By using descriptive statistics, it can be seen that the slowdown in community activity has an impact on various economic sectors. The primary sector contracted but its growth was still above zero percent. While the secondary and tertiary sectors, most of their sub-sectors contracted quite deeply. This situation shows that society as consumers has acted rationally even though in the end it reduced national economic growth. To overcome this problem, government intervention is required through its fiscal allocation function.*

*Keywords: Covid-19, Google Mobility Index, Rate of Economic Growth, Rational Consumer*

#### **Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ketika terjadi gejolak ekonomi akibat pandemi covid-19, pergerakan masyarakat menurun sebagaimana ditunjukkan oleh data Google Mobility Index. Keadaan ini diperkuat dengan diterapkannya kebijakan yang membatasi gerak masyarakat. Kajian ini akan membahas lebih jauh rasionalitas masyarakat Indonesia dalam merespon kebijakan yang ada dan dampaknya bagi perekonomian sektoral. Dengan menggunakan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa perlambatan aktivitas masyarakat berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Sektor primer mengalami kontraksi tetapi pertumbuhannya masih di atas nol persen. Sementara sektor sekunder dan sektor tersier sebagian besar sub sektornya terkontraksi cukup mendalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen telah bertindak rasional meski pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi masalah ini, campur tangan pemerintah diperlukan melalui fungsi alokasi fiskalnya.

Kata Kunci: Covid-19, Google Mobility Index, Pertumbuhan Ekonomi, Rasionalitas Konsumen

#### **1. PENDAHULUAN**

Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari sisi pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi masyarakat atau pengeluaran konsumen (*consumption* biasa dilambangkan C). Kontribusi pengeluaran rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat lebih dari 50 persen di setiap tahunnya [1]. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat mendominasi struktur PDB sehingga pola pertumbuhan ekonomi Indonesia bercirikan *consumption driven growth* [2].

Di tengah kondisi ekonomi yang stabil, konsumsi masyarakat yang semakin tinggi akan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika terjadi gejolak pasar baik yang dipengaruhi dari dalam negeri maupun luar negeri maka pengeluaran masyarakat akan menurun dan diikuti pula oleh pertumbuhan ekonomi. Untuk tetap dapat menjaga konsumsi masyarakat dan perekonomian, diperlukan peran serta pemerintah [3].

Mengapa hal ini perlu untuk tetap dijaga? Pertumbuhan ekonomi yang melemah menunjukkan adanya kontraksi yang dapat membawa perekonomian ke jurang resesi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan dibeli oleh masyarakat. Secara rasional, perusahaan akan menurunkan harga jual produk yang dihasilkan demi tercapainya target penjualan meski berpengaruh pada penurunan laba. Namun, jika perusahaan tetap mempertahankan harga, konsekuensi yang harus diterima adalah terjadinya penghematan faktor produksi. Tenaga kerja yang kian berkurang akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Pendapatan masyarakat akan menurun dan resiko kredit macet akan semakin tinggi.

Dalam catatan sejarah, Indonesia telah mengalami berbagai guncangan ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 dan krisis keuangan global 2008/2009 [4]. Pada akhir 2019 ditemukan virus corona yang pertama kali terkonfirmasi di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia ini membuat perekonomian sebagian besar negara di dunia ambruk. Dilema antara menyelesaikan masalah kesehatan atau menjaga perekonomian tetap stabil menjadi masalah yang sering kali dikaji. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan regulasi yang menjamin kesehatan masyarakat dan menjaga perekonomian tetap dalam kondisi baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang melanda telah menjadikan masyarakat sebagai “konsumen yang rasional” meski di sisi lain melemahkan struktur ekonomi nasional.

Dalam skala regional, penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Prima (2022) yang berfokus pada dampak kebijakan pemerintah terhadap pariwisata di Provinsi Bali menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya pembatasan sosial, salah satu kebijakan yang diterapkan pada masa itu [5]. Kajian tersebut didukung oleh Sayuti dan Hidayati (2020) yang meneliti di Provinsi Nusa Tenggara Barat [6]. Salah satu penelitian yang dilakukan dalam skala yang lebih luas telah dipaparkan oleh Yamali dan Putri (2020). Penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah selama pandemi berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional [7].

Pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih jauh dampak danantisipasi kebijakan yang dinilai mampu mengatasi masalah – masalah yang timbul. Dev dan Sengupta (2020) dari India mencoba mengukur dampak pandemi di negaranya dan mengusulkan kebijakan yang dianggap dapat mencegah dampak yang lebih parah [8]. Debata et al (2020) juga mencoba merumuskan dampak pandemi tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi juga orang dan lingkungan [9].

Dari berbagai kajian yang telah disebutkan, banyak peneliti yang belum memanfaatkan data yang dipublikasikan oleh Google, yakni Google Mobility Index. Data ini mampu menggambarkan pergerakan manusia di Indonesia termasuk juga dunia. Pergerakan yang tercatat khususnya pada masa pandemi ini akan bermanfaat guna melihat lebih jauh perekonomian di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk membahas secara lebih spesifik bagaimana gambaran konsumen yang rasional sebagai respon atas keadaan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kajian ini akan menilai dampak rasionalitas konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini akan bermanfaat dalam menjelaskan rasionalitas konsumen secara umum, melengkapi kajian perilaku konsumen perspektif ekonomi mikro pada studi kasus makro, dan informasi mengenai dampak bagi dunia usaha ke depan jika menghadapi kasus yang hampir sama.

## 2. BAHAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Kajian Literatur

Beberapa pemikir mendefinisikan pertumbuhan ekonomi yang berbeda – beda. Ada yang mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah (regional atau nasional) pada periode waktu tertentu [10]. Pendapat ini mendasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi (pengeluaran). Sementara pendapat lainnya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang diukur dengan nilai nominal (harga berlaku). Pendapat ini dikemukakan oleh Tarigan (2005) [11].

BPS sebagai lembaga independen pemerintah yang berwenang menyiapkan data untuk keperluan pembangunan mengkonsep pertumbuhan ekonomi sebagai tingkat pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi adalah data PDB. Kuncoro (2015) menyebut bahwa ada 3 pendekatan dalam menghitung PDB yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan [2]. Dari ketiganya, pendapatan pengeluaran adalah cara yang lazim digunakan. Formulasinya adalah sebagai berikut:  $PDB = C + G + I + (X - M)$  di mana  $C$  = konsumsi seluruh masyarakat,  $G$  = jumlah pengeluaran pemerintah,  $I$  = jumlah pengeluaran untuk barang modal (investasi),  $X$  = ekspor,  $M$  = impor. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat digunakan rumus (1) berikut:

$$PE = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\% \quad (1)$$

Dalam banyak literatur, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan penduduk (angkatan kerja), akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Namun pada kenyataannya, tidak semua barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, beberapa perusahaan melakukan ekspansi melalui ekspor untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas.

Seberapapun usaha perusahaan menjual produknya, konsumen memiliki preferensi tersendiri. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Pembelian produk barang atau jasa oleh konsumen sedikit banyak dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang itu sendiri. Namun, hal itu bukan berarti meniadakan faktor yang lain seperti harga barang pembanding, selera konsumen, dan ramalan di masa mendatang. Ariely (2008) menyebutkan bahwa terkadang konsumen juga dipengaruhi oleh rasionalnya dalam membeli barang dan jasa [12]. Rasionalitas konsumen nyatanya dapat mempengaruhi pembelian produk. Apabila rasionalitas ini berlaku bagi seluruh konsumen (masyarakat) maka dalam skala yang lebih besar dapat berpengaruh pada pendapatan nasional dan turunannya yakni pertumbuhan ekonomi.

## 2.2 Metodologi penelitian

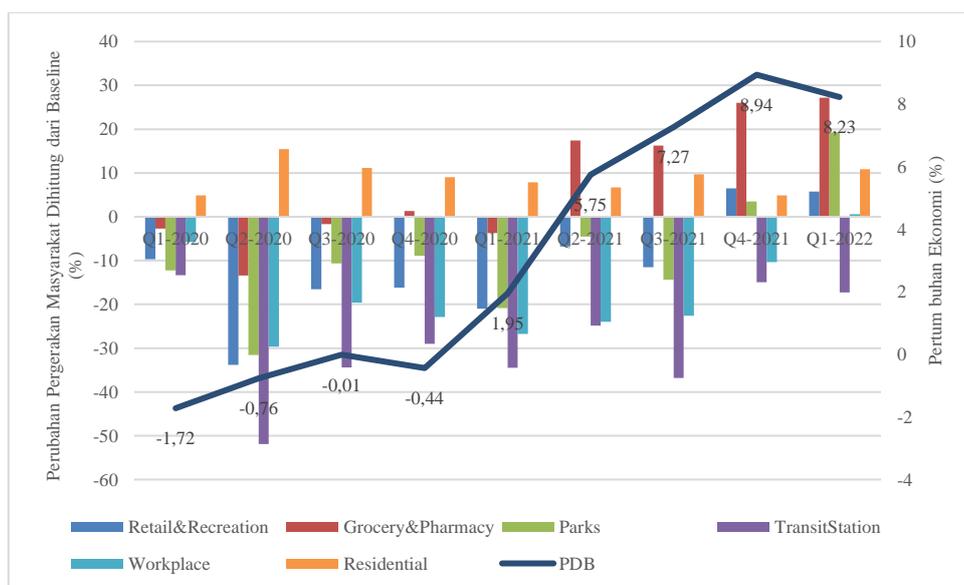
Menurut sifatnya, studi ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif karena menggunakan data – data berupa angka. Data yang dimaksud ialah: (1) data pergerakan manusia yang terekam dan dipublikasikan dalam Google Mobility Index (GMI); (2) data pertumbuhan ekonomi sektoral kuartal ke kuartal (*q-to-q*) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan/atau Bank Indonesia.

Data GMI dikeluarkan oleh Google dengan membagi jenis tempat kunjungan ke dalam 6 bagian di antaranya ritel dan rekreasi (*retail and recreation*), kebutuhan sehari – hari dan obat – obatan (*grocery and pharmacy*), taman (*parks*), transportasi umum (*transit stations*), tempat kerja (*workplaces*), dan pemukiman penduduk (*residential*). Yang termasuk dalam bagian ritel dan rekreasi adalah pergerakan masyarakat ke rumah makan, *cafe*, *mall*, taman hiburan, museum, perpustakaan dan bioskop. Sementara yang termasuk bagian kebutuhan sehari – hari dan obat – obatan adalah pasar tradisional, pasar modern (*supermarket*), toko obat dan apotik. Taman terbuka, lapangan umum, dan taman nasional dikategorikan ke dalam taman. Pergerakan masyarakat ke transportasi publik berupa stasiun, bandara, terminal dan pelabuhan. Adapun yang dimaksud tempat kerja adalah pergerakan masyarakat ke lokasi tempat kerjanya masing – masing. Sedangkan yang dikategorikan *residential* adalah area pemukiman penduduk atau tempat tinggal masyarakat.

Selain dari pada itu, penelitian ini juga mencatat kebijakan yang diterapkan pemerintah sejak covid-19 melanda hingga kuartal pertama 2022. Berdasarkan data di atas maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran pertumbuhan ekonomi dan pergerakan masyarakat pada awal pandemi (kuartal pertama, Q1-2020) hingga kuartal pertama (Q1) 2022 dapat dilihat pada gambar 1 berikut



**Gambar 1** Pertumbuhan Ekonomi dan Pergerakan Masyarakat

Informasi mengenai adanya virus covid-19 di Wuhan, Tiongkok telah diketahui oleh banyak penduduk dunia termasuk Indonesia. Di awal 2020, pandemi covid-19 mulai menginfeksi ke Indonesia. Sebagaimana pernyataan pemerintah yang pertama kali mengumumkannya pada 2 Maret 2020. Namun, banyak yang meragukannya. Terlepas dari kontroversi yang ada, ternyata masyarakat telah merespon informasi virus tersebut. Hal ini tampak dari penurunan aktivitas di berbagai tempat sebagaimana dilaporkan dalam data GMI.

Pasca diumumkannya virus covid-19 pertama di Indonesia, pemerintah mulai merancang strategi untuk menghadang virus. Pada awalnya, pemerintah tampak belum begitu serius menanggapi kasus covid-19. Tarik ulur kebijakan untuk bidang kesehatan atau bidang ekonomi menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Lambat laun, kebijakan pemerintah mulai tegas diterapkan sebagaimana dirangkum dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1** Respon Kebijakan Pemerintah terhadap Pandemi Covid-19.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Portal Berita, 2022.

No	Nama Kebijakan	Tanggal Penetapan	Pemberlakuan Wilayah
1.	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	31 Maret 2020	27 wilayah (provinsi dan/atau kabupaten)
2.	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid 1	11 Januari 2021	Jawa – Bali (7 wilayah provinsi)
3.	PPKM Jilid 2	26 Januari 2021	Jawa – Bali (7 wilayah provinsi)
4.	PPKM Berbasis Mikro	9 Maret 2021	10 provinsi dan pada perkembangannya terus bertambah hingga nasional
5.	PPKM Level Darurat	3 Juli 2021	Jawa – Bali (7 wilayah provinsi)
6.	PPKM Level 1 – 4	26 Juli 2021	Sejumlah provinsi

Respon masyarakat pada kebijakan pemerintah ditandai dengan berkurangnya pergerakan masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, pada Q2-2020 di mana PSBB mulai diberlakukan, masyarakat banyak memilih tinggal di rumah. Peningkatan angka *residential* pada data GMI tampak jelas. Sementara 5 kategori lainnya menunjukkan penurunan. Adapun penurunan yang paling dominan terjadi pada kategori *transit stations* terkontraksi rata – rata lebih dari 50 persen.

Pada kuartal berikutnya, aktivitas masyarakat mulai berangsur membaik. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya tinggal di rumah. Mengingat bahwa ada tugas yang harus dikerjakan, ada pula tanggung jawab yang harus ditunaikan, salah satunya adalah menyangkut pekerjaan. Kategori *workplace* menunjukkan peningkatan namun pada periode berikutnya mengalami penurunan kembali. Pada periode ini, banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah karyawannya. Sedangkan kategori *grocery and pharmacy* menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditengarai oleh perilaku konsumen yang menganggap kasus baru yang menimpa Indonesia berhubungan dengan kesehatan. Pada saat yang sama, kebutuhan primer khususnya pangan harus tetap terpenuhi. Adapun kategori lain masih menunjukkan adanya pelemahan aktivitas.

Pada periode selanjutnya dan seterusnya, pemerintah mulai melonggarkan kebijakannya khususnya pada masa PPKM Level 1 – 4. Dampak dari kebijakan ini, masyarakat mulai sadar untuk bertanggung jawab secara pribadi akan kesehatannya. Tampak bahwa beberapa kategori menunjukkan perbaikan yang signifikan. 3 kategori (*retail and recreation*, *grocery and pharmacy*, dan *parks*) telah tumbuh positif di atas *baseline* (titik nol). *Residential* juga berada di atas titik nol baseline akan tetapi mengalami penurunan. Aktivitas masyarakat dapat dikatakan berangsur membaik dan mendekati kenormalan. Namun, keadaan ini tidak berlaku sepenuhnya bagi katogori *transit station* dan *workplace*. Diketahui bahwasannya pada masa PPKM level 1 – 4, pemerintah masih memberlakukan syarat perjalanan yang ketat dan untuk bekerja di kantor juga masih dibatasi.

Pertumbuhan ekonomi terkena dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat. Pada awal pandemi, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 terkontraksi cukup dalam yakni -1,72 persen. Namun, keadaan ini berangsur-angsur membaik seiring dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Hingga kuartal keempat 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat. Hanya saja di kuartal pertama 2022, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi yang selama lima kuartal (Q1-2020 hingga Q1-2021) tercatat negatif. Sedangkan mulai kuartal kedua (Q2) 2021 dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami trend kenaikan atau tumbuh positif. Sektor apa saja yang menyeret pertumbuhan ekonomi turun dan naik akan dibahas secara komprehensif pada bagian berikut. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari struktur PDB yang terdiri dari 17 sektor. Adapun pertumbuhan masing – masing sektor selama kurun waktu tersebut

**Tabel 2** Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor Selama Periode Q1-2020 hingga Q1-2022  
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, 2022.

Sektor	Q1-2020	Q2-2020	Q3-2020	Q4-2020	Q1-2021	Q2-2021	Q3-2021	Q4-2021	Q1-2022
1	3.67	2.32	1.93	3.27	0.84	4.22	6.83	6.45	6.61
2	-18.71	-11.38	-8.03	-11.88	15.8	38.73	59.8	75.15	50.13
3	0.92	1.31	1.88	1.32	1.9	3.18	3.31	3.51	4.7
4	-0.71	-0.94	-0.75	-0.57	-0.01	0.57	0.23	-0.03	0.04
5	-0.14	0.49	0.39	0.34	0.97	1.74	1.22	1.4	0.76
6	0.17	0.29	0.83	0.38	2.94	3.89	4.79	5.34	4.69
7	-0.21	-0.31	0.7	0.59	1.68	5.49	7.26	7.32	7.61
8	-13.73	-8.72	-6.17	-7.92	-3.72	6.65	-0.64	3.45	6.14
9	-0.83	-0.63	-0.39	-0.25	-0.26	1.19	0.7	1.31	1.8
10	0.61	-0.28	-0.2	0.43	0.23	0.84	0.82	1.01	0.61
11	-0.19	-0.14	0.41	0.41	1.64	3.87	5.02	6.15	5.98
12	1.24	0.8	0.45	0.92	0.23	0.24	0.39	0.68	1.53
13	2.49	1.58	1.85	2.27	1.45	1.48	1.58	1.76	2.29
14	-1.26	1.84	4.62	1.96	0.27	2.2	-1.84	1.52	1.41
15	1.06	2.07	3.55	2.54	0.77	2.14	-0.24	1.65	1.53
16	1.77	4.04	4.56	3.23	2.73	3.02	-0.9	1.94	1.06
17	3.26	0.95	0.6	2.11	0.74	0.55	1.36	1.42	1.74

Dari Tabel 2 di atas, diketahui bahwa Sektor 1 (Pertanian, Kehutanan, Perikanan) dan Sektor 2 (Pertambangan dan Penggalian) disebut sektor primer. Selama masa covid-19 hingga saat ini, Sektor 1 tetap tumbuh positif. Sementara Sektor 2 berkontraksi selama kurun waktu 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor 1 memegang peran penting ketika terjadi gejolak ekonomi. Kebutuhan akan pangan tetap harus dipenuhi bagaimanapun keadaannya. Sementara untuk kegiatan pertambangan dan penggalian selama masa tersebut bukan termasuk hal yang mendesak untuk terus dikerjakan.

Sektor 3 (Industri pengolahan), Sektor 4 (Pengadaan listrik dan gas), Sektor 5 (Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang), dan Sektor 6 (Konstruksi) disebut sektor sekunder. Sama seperti Sektor 1, Sektor 3 dan Sektor 6 tidak mengalami penurunan pertumbuhan selama periode covid-19 hingga Q1-2022. Artinya industri pengolahan dan konstruksi tetap berjalan serta mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Sektor 4 terkoreksi cukup dalam. Kebutuhan listrik sejatinya merupakan salah satu kebutuhan mendasar di era modern seperti sekarang ini. Namun, pengadaan listrik pada masa pandemi banyak ditopang oleh subsidi pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengalami penurunan ekonomi sehingga konsumsi rendah. Untuk menjaga agar konsumsi tetap stabil maka diperlukan campur tangan pemerintah yang dalam hal ini terwujud melalui subsidi listrik. Adapun Sektor 5 hanya mengalami kontraksi pada awal pandemi yakni Q1-2020. Pada periode berikutnya, sektor ini bergerak fluktuatif.

Sektor 7 (Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor), Sektor 8 (Transportasi dan penggudangan), Sektor 9 (Penyediaan akomodasi, makan dan minum), Sektor 10 (Informasi dan komunikasi), Sektor 11 (Jasa keuangan dan asuransi), Sektor 12 (*Real Estate*), Sektor 13 (Jasa Perusahaan), Sektor 14 (Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib), Sektor 15 (Jasa Pendidikan), Sektor 16 (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) dan Sektor 17 (Jasa Lainnya) dikategorikan sebagai sektor tersier. Sektor inilah yang mendapat kontraksi mendalam terutama pada Sektor 8. Pada masa pandemi, pembatasan aktivitas masyarakat untuk bepergian sangat ketat. Penggunaan transportasi umum seperti pesawat, kapal, kereta dan bus mendapat tekanan dari kebijakan ini. Masyarakat merespon hal ini dengan tidak banyak melakukan aktivitas perjalanan. Inilah yang kemudian berdampak besar pada sektor transportasi dan penggudangan. Di sisi lain, sektor ini tidak mendapatkan subsidi pemerintah.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dari sekian banyak sektor jasa, *real estate*, jasa perusahaan, dan jasa lainnya menunjukkan kinerja yang tetap tumbuh positif meskipun terjadi beberapa kali penurunan. Proyek – proyek perumahan baik yang dibangun oleh pemerintah ataupun swasta tetap berjalan meski terjadi pandemi. Ini berkaitan dengan proyek – proyek pembangunan pemerintah yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana. Adapun layanan kesehatan dan jasa pendidikan adalah kebutuhan dasar penduduk apalagi di saat pandemi. Pemerintah banyak menutup biaya – biaya yang timbul sebagai akibat dari virus corona, baik dari pengobatan, karantina, hingga program vaksin. Untuk memastikan program kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kampus tetap berjalan, pemerintah mensubsidi kuota internet siswa dan guru, menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi anak sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan subsidi upah. Oleh karena itu, sektor – sektor ini tetap menunjukkan *trend* yang positif.

Menjelang akhir 2020, perekonomian tidak hanya dihadapkan pada masalah covid-19 yang belum tuntas tetapi juga sentiment global. Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina adalah yang paling kentara. Pasalnya permasalahan kedua negara tersebut berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah, melemahnya kinerja pasar modal, dan ekspor semakin kecil. Di tingkat global, harga minyak dunia semakin tinggi membuat buruk kinerja APBN. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax. Selain itu, beberapa negara di dunia seperti India, Mesir, Kazakhtan, dan Kosovo melakukan pembatasan ekspor gandum yang membuat inflasi beberapa bahan pokok. Hal ini diperparah dengan adanya krisis minyak goreng yang bahkan hingga saat ini harganya masih di atas normal.

Menurunnya pendapatan nasional yang disebabkan oleh respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait covid-19 ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Meskipun produsen atau pelaku usaha melakukan berbagai promosi dalam penjualan produk mereka, tampaknya masyarakat berfikir secara rasional. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang mesti dipenuhi. Menurut [1] yang tergolong kebutuhan dasar di antaranya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Di masa pandemi, kebutuhan akan sandang dan papan bukanlah kebutuhan mendasar karena masyarakat telah memilikinya. Yang lebih penting dari itu adalah ketersediaan pangan karena kenyataannya banyak negara yang menghentikan ekspor ke negara lain demi memenuhi kebutuhan dalam negeri termasuk Indonesia. Di samping kebutuhan pangan, jaminan kesehatan masyarakat sangat diperlukan. Jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masing – masing tidak cukup. Pemerintah perlu memberikan ketegasan, pembatasan, dan bantuan bagi masyarakat. Peningkatan pertumbuhan sektoral dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa pada saat masyarakat tidak mampu untuk menutupi kebutuhan ini, pemerintah telah hadir untuk memberikan jaminan. Jika pemerintah tidak memberikan bantuan kesehatan maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi sektoral maupun nasional akan berkontraksi cukup dalam dan bahkan negatif.

Kebutuhan pokok selanjutnya adalah masalah pendidikan. Pandemi covid-19 yang hadir tanpa bisa diprediksi sebelumnya membawa dampak tidak dapat dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Platform belajar melalui media *online* menjadi pilihan yang tepat akan tetapi diperlukan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan laptop, smartphone, tab, beserta turunannya yakni kuota internet menjadi kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Sayangnya, gejala perekonomian yang tidak stabil membuat sebagian besar penduduk mengalami kesulitan untuk memperoleh pendapatan. Sekali lagi, bantuan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin peningkatan pembangunan manusia melalui pendidikan.

Pandemi covid-19 yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia bukanlah masalah yang mengancam dari sisi keamanan/kedaulatan negara yang pada akhirnya menyebabkan perang. Virus corona merupakan masalah di bidang kesehatan yang berdampak pada sisi perekonomian karena membatasi pergerakan masyarakat. Respon dari keadaan ini membangun rasionalitas masyarakat. Kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi kebutuhan primer bukanlah kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi pada masa pandemi, seperti pembelian kendaraan dan peralatan rumah tangga. Apalagi jika kebutuhan tersebut adalah kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan akan barang mewah.

Rasionalitas konsumen yang terbangun pada masa pandemi memberikan sinyal bahwa masyarakat telah mengetahui dan mampu memilah kebutuhan mana yang harus terpenuhi. Hal ini tampak dari pertumbuhan ekonomi sektoral sebagaimana digambarkan sebelumnya. Meski pada akhirnya hal tersebut menurunkan pendapatan agregat secara nasional, namun apa yang dilakukan masyarakat sesuai dengan rasionalitas dalam teori perilaku konsumen. Pemerintah sebagai regulator dan pemain pasar dalam sistem ekonomi dewasa ini memegang peran penting ketika terjadi hal – hal seperti ini. Untuk menjaga konsumsi masyarakat tetap tumbuh, maka pemerintah melalui fungsi alokasi APBN-nya harus mengambil peran. Walaupun hal ini dapat meningkatkan utang pemerintah, keadaan *emergency* mesti disikapi dengan bijaksana dan dengan perhitungan matang agar semua elemen bangsa dapat terjaga dan mampu melewati masa ketidakstabilan ekonomi dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah memaksa pemerintah melakukan pembatasan pergerakan masyarakat. Respon masyarakat sebagai konsumen menyikapi permasalahan ini dapat dikatakan rasional. Hal ini dapat dilihat dari riwayat pergerakan masyarakat yang terekam dalam data GMI dan pertumbuhan ekonomi sektoral. Sektor primer (pertanian dan pertambangan) tetap tumbuh di atas nol persen meski pergerakannya fluktuatif. Sementara sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa) sebagian besar sub sektornya mengalami kontraksi yang cukup mendalam. Untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui konsumsi masyarakat diperlukan campur tangan pemerintah melalui kemampuan fiskalnya.

## REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2022,” Jakarta, 2022. Accessed: Mar. 09, 2022. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- [2] M. Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisa Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2015.
- [3] I. Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- [4] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- [5] N. M. A. K. Cahyadi and S. R. Prima, “Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial terhadap Kinerja Pendapatan Restoran di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 11, no. 4, pp. 470–483, 2022.
- [6] R. H. Sayuti and S. A. Hidayati, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” *Resiprokal*, vol. 2, pp. 133–150, 2020.
- [7] F. R. Yamali and R. N. Putri, “Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, vol. 4, no. 2, pp. 384–388, 2020.
- [8] M. Dev and R. Sengupta, “Covid-19: Impact on the Indian Economy,” Mumbai, 2020.
- [9] B. Debata, P. Patnaik, and A. Mishra, “Covid-19 Pandemic! It’s Impact on People, Economy, and Environment,” *J Public Affairs Practitioner Paper*, pp. 1–5, 2020.
- [10] S. Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- [11] Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- [12] D. Ariely, *Irrational Consumer*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.